



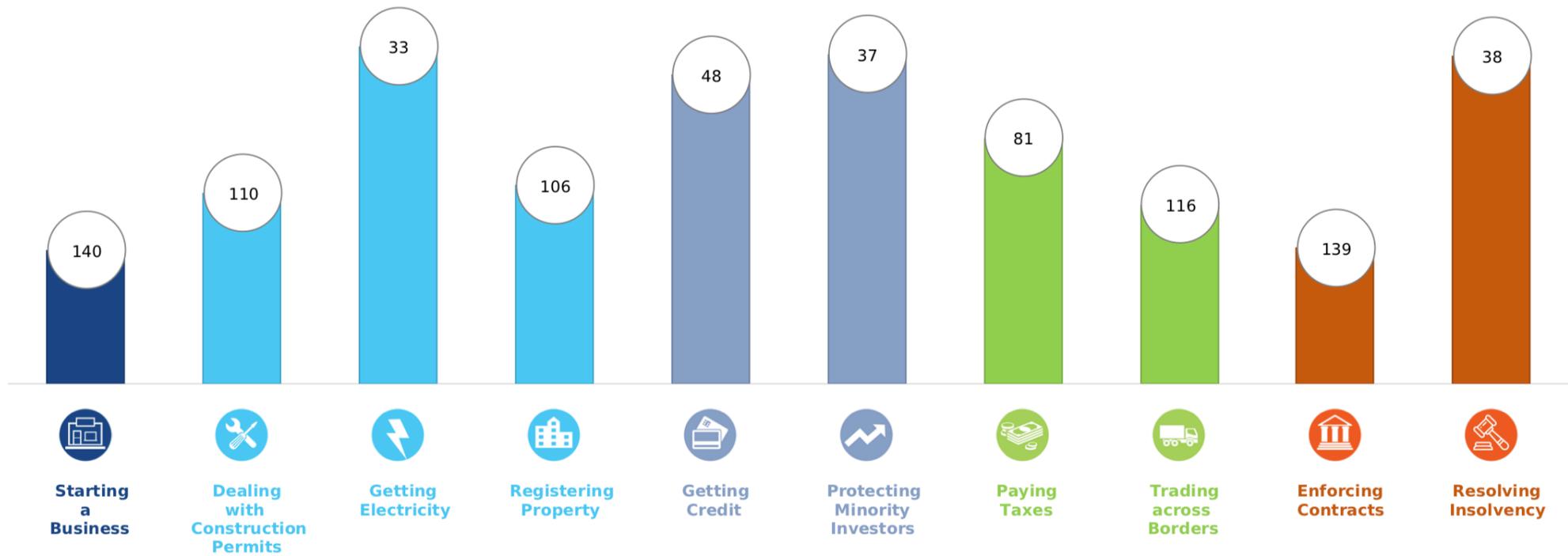
PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Regulasi Kita dan Kebutuhan Kebijakan Berbasis Bukti

Gita Putri Damayana
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Disampaikan dalam Diskusi PUKAT UGM Problem Legislasi dan
Jakarta, 16 Juli 2020

Hanya untuk kepentingan diskusi, tidak untuk disebarluaskan
dan dikutip tanpa izin

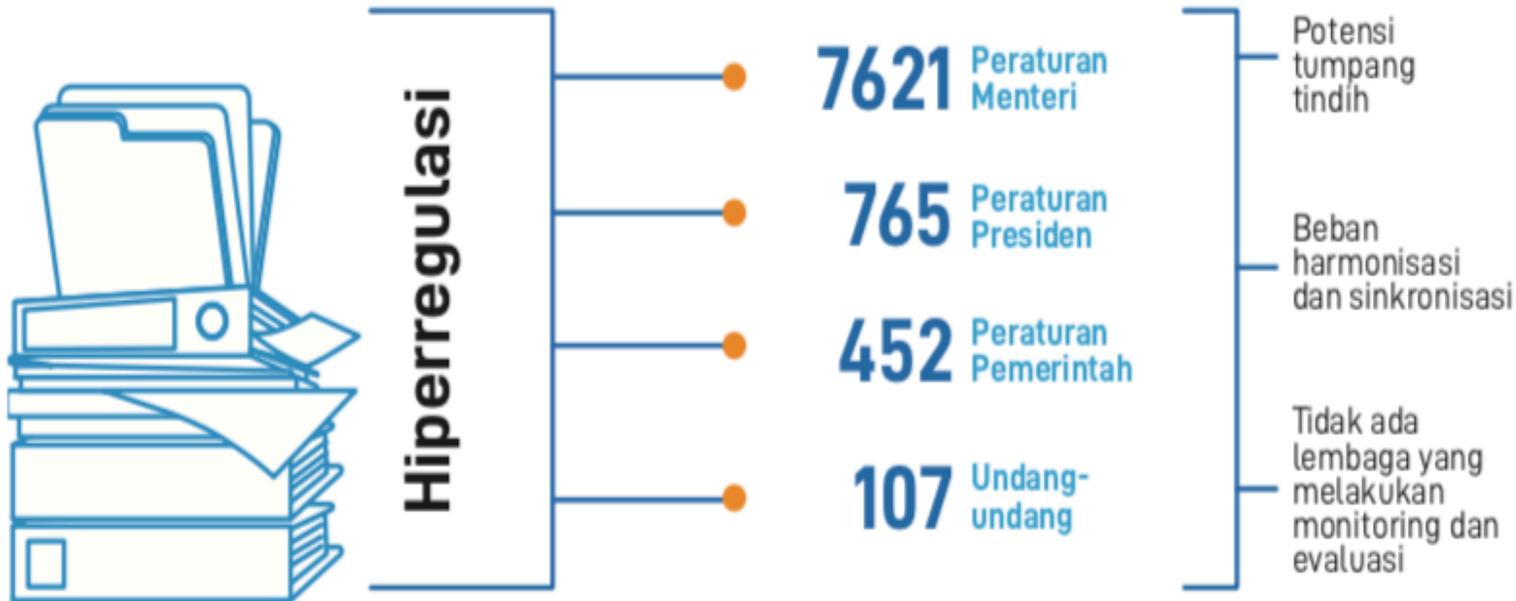


Ease of Doing Business Indonesia



Bagan 4

Jumlah Regulasi yang Dihasilkan di Tingkat Pusat (Periode 2014–Oktober 2018)



Data PSHK menunjukkan bahwa dari 2014 hingga November 2019 telah terbit [10.180 regulasi](#), berupa 131 Undang-Undang (UU), 526 Peraturan Pemerintah (PP), 839 Peraturan Presiden (perpres) dan 8.684 Peraturan Menteri (permen)



Perencanaan Regulasi dan Implementasinya

Tahun Program Penyusunan	Jumlah RPP dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di luar Rencana Program Penyusunan
2014	80	18	83
2015	151	19	123
2016	196	35	64
2017	89	3	63
2018	43	3	45

Tahun Program Penyusunan	Jumlah Rancangan Perpres dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di luar Rencana Program Penyusunan
2014	22	11	179
2015	92	14	158
2016	91	2	123
2017	54	4	133
2018	30	3	124

90%
PP & Perpres
 yang dihasilkan adalah di luar program penyusunan

Penyusunan PP dan Perpres di luar Progsun melalui prosedur izin prakarsa

Signifikasi Program Penyusunan PP dan Perpres permasalahan dalam perencanaan legislasi

Hal Apa Saja Yang Ternyata Ada dalam RUU Omnibus Cipta Kerja?

- BUMN bisa menyelenggarakan riset dan penelitian untuk mendukung inovasi - pasal 119 Omnibus revisi pasal 66 UU 19/2003 Tentang BUMN
- Pasal 9 UU 10/2013 tentang Pendidikan Kedokteran tentang kuota nasional dihapus dalam Omnibus - Pasal 71 Omnibus
- Kewenangan Pemprov dan Pemkab untuk penyelesaian sengketa air lintas provinsi/kabupaten/kota dalam pasal 13,15 dan 20 UU Sumber Daya Air 17/2019 dihapus oleh Pasal 55 Omnibus.



Apakah RUU Omnibus Cipta Kerja menjadi jawaban? Apa Tawaran Solusi PSHK?

Peraturan pelaksana RUU Omnibus Cipta Kerja memiliki 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah

Fokus pada persoalan yang hulu yaitu tidak adanya sinkronisasi agenda pembangunan dengan perencanaan, monitoring serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

[HOME](#) > [NASIONAL](#) >

PSHK Usulkan Badan Regulasi Sebelum Jokowi Ajukan Omnibus Law

Reporter: [Budiarti Utami Putri](#)

Editor: [Jobpie Sugiharto](#)

Jumat, 20 Desember 2019 02:03 WIB



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

DARON ACEMOGLU
JAMES A. ROBINSON

AUTHORS OF WHY NATIONS FAIL

THE NARROW CORRIDOR

STATES,
SOCIETIES, AND THE
FATE OF LIBERTY



"Well, in our country,' said Alice, still panting a little, 'you'd generally get to somewhere else — if you ran very fast for a long time, as we've been doing."

"A slow sort of country!' said the Queen. ' Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place."

TERIMA KASIH